

**LAPORAN KINERJA
BAGIAN HUMAS T.A 2018**

KATA PENGANTAR

Foto
(optional)

Laporan Kinerja Bagian Humas merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Biro Hukum, Organisasi dan Humas pada Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja Bagian Humas Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Humas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2018, Bagian Humas sebagai bagian dari Biro Hukum, Organisasi dan Humas bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja **di bidang kehumasan dalam rangka memberikan pelayanan publik** merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Bagian Humas juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Bagian Humas Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro Hukum, Organisasi dan Humas di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, 25 Januari 2019
Kepala Bagian Humas

Titin Resmiatin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Bagian Humas Tahun 2018 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 6 (enam) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN yang diamanatkan kepada Bagian Humas.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Bagian Humas tahun 2018 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan publikasi tentang BSN kepada masyarakat	1	Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN	11	16	145%
		2	Jumlah pemberitaan tentang BSN dan SNI	1200	2.271	189%
		3	Jumlah press release	48	48	100%
		4	Jumlah koordinasi internal dan antar lembaga	25	25	100%
		5	Jumlah Laporan Tahunan	1	1	100%
		6	Jumlah kalender tahunan BSN	1	1	100%

Dari 6 (enam) indikator kinerja di Bagian Humas, terdapat dua indikator kinerja yang diatas 100%, yaitu jumlah pemberitaan tentang BSN dan SNI (189%) dan jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN (145%), sedangkan yang lainnya sesuai dengan target.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	6
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	5
I.2 Maksud dan Tujuan	5
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
I.4 Sumber Daya Manusia	7
I.5 Peran Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	9
II.1.1 Visi dan Misi	9
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	9
II.2 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	15
III.2 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja (tidak ada)	22
III.3 Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	
Penutup	24
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bagian Humas), sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja bagian Humas memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Biro Hukum, Organisasi dan Humas dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bagian Humas merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum, Organisasi dan Humas tahun 2018.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian Humas adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Hukum, Organisasi dan Humas, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

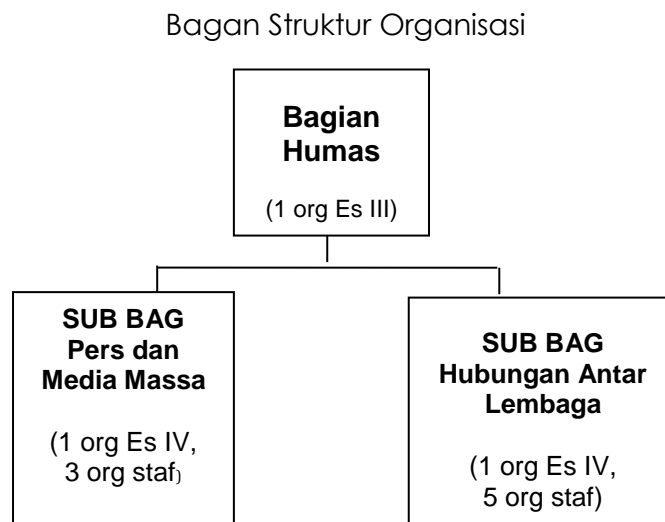
I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bagian Humas adalah melaksanakan urusan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga serta dokumentasi dan publikasi kegiatan Badan

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Bagian Humas menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
2. pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga;
3. pelaksanaan urusan hubungan pers dan media massa;
4. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi.

Struktur Bagian Humas dapat dilihat pada gambar berikut.



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bagian Humas mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Sub Bagian Pers dan Media dengan tugas mempunyai tugas melakukan penyebarluasan informasi, penerbitan berkala, brosur, poster dan media lain, serta melakukan pendokumentasian, penyelenggaraan display dan pameran, dan urusan kerjasama dengan media massa
2. Sub bagian Hubungan Antar Lembaga, dengan tugas mempunyai tugas melakukan urusan hubungan antar lembaga komunikasi, publikasi dan kehumasan serta penyusunan laporan tahunan.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2018 Bagian Humas memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 11 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Bagian Humas

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Kepal Bagian Humas			1	1
2.	Sub bagian Pers dan Media Massa		3	1	4
3.	Sub bagian Hubungan Antar Lembaga	2*)	4**)		6
Jumlah		2	7	2	11

Keterangan:

selama tahun 2018:

*) : satu (1) orang meninggal dunia pada Maret 2018

**): dua (2) orang sedang menempuh pendidikan diluar negeri dan 1 orang ditugaskan di KLT Palembang selama 6 bulan terakhir

Sehingga jumlah total yang efektif bekerja di kantor selama tahun 2018: 7 orang

Photo Seluruh Personel (optional)

Gambar I.2 Personel Bagian Humas

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bagian Humas mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu fungsi kehumasan. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bagian Humas telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Bagian Humas

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. BSN semakin diminati wartawan / media	<ul style="list-style-type: none">- Terkadang masih sulit mendapatkan data yang di perlukan- Belum adanya Juru Bicara BSN sehingga respon terhadap permintaan wawancara wartawan tidak cepat	<ul style="list-style-type: none">- Mengingatnkan kepada unit terkait untuk secara teratur meng update / memperbaharui data- Memohon bantuan salah seorang pejabat Eselon II yang bersedia diwawancara dengan wartawan
2. Unit kerja mulai respon dan meminta kegiatannya untuk diliput	<ul style="list-style-type: none">- Masih adanya permintaan peliputan yang mendadak	<ul style="list-style-type: none">- Mengingatnkan unit terkait (melalui sekretaris) untuk menginformasikan kegiatan yang ingin diliput jauh-jauh hari

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<p>3. Stakeholder sangat tertarik dengan majalah SNI Valuasi (misal: Baristand Pontianak yang bahkan mau menanggung biaya pengiriman majalah SNI Valuasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran berada di Pusdikmas namun pelaksanaan operasional di Humas 	<ul style="list-style-type: none"> - Edisi ke 4 dalam bentuk soft copi

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Biro Hukum, Organisasi dan Humas sesuai Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum, Organisasi dan Humas Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

“Menyediakan SDM profesional, informasi aktual kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang implementatif”

MISI

1. Merencanakan dan mengadakan SDM sesuai dengan kebutuhan BSN secara transparan dan akuntabel;
2. Memberikan pelayanan prima dibidangi kepegawaian .
3. Memfasilitasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan;
4. Menyusun peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi;
5. Menyediakan dokumentasi dan informasi hukum;
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama stakeholder terhadap BSN;
7. Memperluas jaringan kemitraan yang mendukung pencitraan lembaga.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur

sejauh mana visi dan misi Biro Hukum, Organisasi dan Humas telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Biro Hukum, Organisasi dan Humas adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Mewujudkan tata kelola peraturan perundangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, SDM yang berkualitas serta informasi kelembagaan yang akurat dan akuntabel.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Biro Hukum, Organisasi dan Humas selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Biro Hukum, Organisasi dan Humas) dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro HOH harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2018, sasaran Biro Hukum, Organisasi dan Humas telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

SASARAN

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Biro HOH berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai upaya penyempurnaan adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Terwujudnya produk hukum BSN.
3. Terwujudnya paket pengembangan SDM sesuai analisis kebutuhan.
4. Terwujudnya paket publikasi kelembagaan.
5. Tersusunnya laporan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi

KEBIJAKAN

Penerapan Sistem Manajemen Mutu Secara Menyeluruh

PROGRAM

1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN;

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Biro Hukum, Organisasi dan Humas sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Organisasi dan Humas Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Organisasi dan Humas tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Biro HOH Tahun 2018

	Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2018
Customer Perspectives				
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	1	% ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100%
		2	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	13 orang
2	Meningkatnya citra kelembagaan BSN	3	% berita positif terkait BSN	100%
3	Meningkatnya pelayanan publik dan layanan prima di lingkungan BSN	4	Indeks kepuasan layanan internal	Nilai 3,4
Internal Process Perspectives				
4	Meningkatkan penyelenggaraan layanan dan bantuan hukum	5	% pemberian bantuan hukum	70%
		6	Jumlah penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan bidang SPK	8 penyuluhan
		7	% peraturan perundangan yang diunggah	80%
5	Meningkatkan pengelolaan ASN BSN	8	% pemenuhan kebutuhan ASN BSN sesuai ABK	70%
6	Meningkatkan kesesuaian peraturan perundangan di bidang SPK	9	Jumlah peraturan perundang – undangan di bidang SPK	9 peraturan
7	Meningkatkan pengelolaan publikasi kepada masyarakat	10	Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN	11 pameran
		11	Jumlah publikasi kelembagaan	1250 publikasi
		12	Jumlah koordinasi internal dan antar lembaga	25 koordinasi
8	Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral	13	Jumlah sektor yang ditangani	5 sektor
9	Meningkatkan upaya penataan pengelolaan organisasi	14	% Pelaksanaan RB sesuai dengan roadmap dan rencana aksi RB	100%
		15	% pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	100%
10	Meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan di bidang SPK	16	% peraturan perundang – undangan yang harmonis di bidang SPK	100%
Learning and Growth Perspectives				
11	Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di Biro HOH	17	Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)	Nilai 83
		18	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	Nilai 70 (BB)

	Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2018
12	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Biro HOH	19	% ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100%
		20	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	2 orang
13	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Biro HOH	21	% Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	100%
		22	% Pemanfaatan BMN	100%
14	Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Biro HOH	23	% Realisasi Anggaran	>95 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro HOH pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 14 (empat belas) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Biro HOH telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Bagian Humas Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Bagian Humas Tahun 2018

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2018
1	Meningkatkan publikasi tentang BSN kepada masyarakat	1.	Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN	11
		2	Jumlah pemberitaan tentang BSN dan SNI	1200
		3	Jumlah press release	48
		4	Jumlah koordinasi internal dan antar lembaga	25
		5	Jumlah Laporan Tahunan	1

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2018
		6	Jumlah kalender tahunan BSN	1

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro HOH melaksanakan 1 kegiatan dalam 2 (dua) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN melalui :

1. Kegiatan: Peningkatan Layanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN yang akan menghasilkan output:

a. Output: Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyediaan informasi publik
2. Melakukan kampanye / edukasi publik
3. Melaksanakan koordinasi internal dan antar lembaga



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro HOH berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bagian Humas telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bagian Humas Tahun 2018.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Biro HOH (maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bagian Humas yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Bagian Humas Tahun 2018

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan publikasi tentang BSN kepada masyarakat	1	Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN	11	16	145%
		2	Jumlah pemberitaan tentang BSN dan SNI	1200	2.271	189%
		3	Jumlah press release	48	48	100%
		4	Jumlah koordinasi internal dan antar lembaga	25	25	100%
		5	Jumlah Laporan Tahunan	1	1	100%
		6	Jumlah kalender tahunan BSN	1	1	100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bagian Humas untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**SASARAN
1**

Meningkatkan publikasi tentang BSN kepada masyarakat

Tabel III.xx
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
1. Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN	Pameran	16	11	12	11	16	145%	8	100 %
2. Jumlah pemberitaan tentang BSN dan SNI	Berita	921	4.238	3.047	1200	2.271	189%	800	100 %
3. Jumlah press release	dokumen	Belum masuk indikator	belum masuk indikator kinerja	belum masuk indikat	48	48	100%	48	100%

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realisasi	%	Target	% capaian
		r kinerja		or kinerja					
4. Jumlah koordinasi internal dan antar lembaga		19	23	25	25	25	100%	25	100%
5. Jumlah Laporan Tahunan		1	1	1	1	1	100%	Masuk ke Biro PKU	
6. Jumlah kalender tahunan BSN		1	1	1	1	1	100%	1	100%
Rata-rata capaian Sasaran							... %		

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan Publikasi tentang BSN kepada Masyarakat terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%, dimana untuk pameran mencapai 145%, dan jumlah pemberitaan BSN dan SNI mencapai 189%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Indikator Kinerja: Jumlah Pameran Standardisasi yang Diikuti BSN

Capaian indikator kinerja jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN pada tahun 2018 mencapai 16 kali, dari 11 kali yang yang ditargetkan. Seperti pemberitaan, keberhasilan pelaksanaan pameran juga didukung oleh stakeholder sehingga BSN mendapatkan kesempatan berpameran secara gratis (biaya sewa pameran ditanggung stakeholder). Dukungan stakeholder juga menyebabkan sosialisasi SNI dan kelembagaan BSN semakin gencar serta informasinya memencar ke berbagai tempat strategis seperti di Kawasan Bangka, Jogja, Makassar. Sinergi dalam berpameran menunjukkan stakeholder mulai membutuhkan BSN untuk mensosialisasikan layanan BSN, informasi mengenai sertifikasi SNI, proses mendapatkan dokumen SNI/standar internasional, berbagai pelatihan standardisasi, dan sebagainya. Kehadiran BSN dalam pameran dinilai stakeholder dapat mendukung stakeholder lain di pameran, seperti pada pameran

Tabel 5. Daftar Partisipasi BSN dalam Pameran

NO.	KEGIATAN PAMERAN	TEMPAT	TANGGAL
1.	Rakernas Ristekdikti	Medan	17 - 18 Januari 2018
2.	Pameran 40th IKAL Lemhanas	Jakarta	25 Maret 2018
3.	Pameran Indolab 2018	Jakarta	4 April 2018
4.	Pameran Gemerlap Expo 2018	Semarang	12 -15 April 2018
5.	Pameran Indonesia Science Day 2018	Jakarta	20-22 April 2018
6.	Pameran China Machinery & Electronic Brand Show	Jakarta	3-5 Mei 2018
7.	Pameran Investrade Expo 2018	Surabaya	26 – 30 Juli 2018
8.	Pameran Indonesia International Toys and Kids Expo	JIExpo Kemayoran, Jakarta	26-28 Juli 2018
9.	Pameran IECEx	Gandaria City, Jakarta	8 – 9 Agustus 2018
10.	Ritech Expo	Pekanbaru, Riau	9-13 Agustus 2018
11.	Pameran International Building	JIExpo Kemayoran, Jakarta	September
12.	Pameran KTNA Expo (Pertanian)	Bangka	21 - 25 September 2018
13.	Pameran PIF	Serpong	19-21 September 2018
14.	Pameran IQSF	Jakarta	17 Oktober 2018
15.	Pameran IQE ke 6	Grand City Convex, Surabaya	25-28 Oktober 2018
16.	Pameran SMK mini	Surabaya	26-27 November 2018



Gambar 2. Pameran Inestrada, Surabaya, 26-30 Juli 2018



Gambar 3. Pameran Ritech Expo, Pekanbaru, 9-13 Agustus 2018

2. Indikator Kinerja: Jumlah pemberitaan tentang BSN dan SNI

Capaian indikator kinerja untuk jumlah pemberitaan BSN dan SNI dihitung dari jumlah kata BSN dan SNI yang tercantum di pemberitaan. Yang dimaksud dengan pemberitaan disini meliputi pemberitaan baik tercetak (koran, majalah, tabloid) maupun online (website BSN, media online). Semakin banyak jumlah kata BSN dan SNI dalam pemberitaan, diharapkan masyarakat akan semakin mengenal BSN dan mengetahui manfaat SNI dan kegiatan standardisasi yang dilakukan oleh BSN

Pada tahun 2018, capaian jumlah pemberitaan BSN dan SNI mencapai 2.271 dari target 1.200 berita. Pemberitaan SNI ternyata banyak disuarakan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, beberapa industri penerap SNI dan stakeholder lainnya. Dengan pemberitaan SNI yang begitu gencar, SNI tersosialisasi kepada masyarakat dan peran BSN semakin diperkukuh dengan artikel-artikel yang seringkali menyebut BSN. Meskipun masih ada beberapa artikel yang masih salah dalam memberitakan peran BSN -misalnya BSN adalah lembaga sertifikasi, namun kecenderungan dari waktu ke waktu hingga akhir tahun 2018 salah penyebutan mulai berkurang.

Tantangan pemberitaan adalah berkurangnya dana liputan ke luar kota yang menyebabkan pemberitaan web BSN dan berita lokal di daerah, kurang optimal. Untuk itu pemberitaan kelembagaan BSN dan SNI di media massa, baik tercetak maupun online masih harus terus di tingkatkan.

3. Indikator Kinerja: Jumlah koordinasi internal dan antar lembaga

Sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan dibidang standarisasi, dalam implementasinya memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder baik menyangkut teknis operasional maupun perumusan kebijakan. Sebagai bagian dari proses manajemen pemerintahan, koordinasi antar instansi/lembaga mutlak diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan lembaga. Koordinasi kelembagaan dan antar instansi/lembaga meliputi pertemuan dengan instansi/asosiasi lain, pertemuan dengan pemerintah daerah/kabupaten/kota, rapat dengar pendapat, partisipasi keikutsertaan dalam forum bakohumas, rapat – rapat koordinasi internal, rapat – rapat pimpinan, dan rapat-rapat teknis lainnya, serta promosi kelembagaan BSN.

Untuk koordinasi kelembagaan baik internal maupun dengan K/L dan pemerintah daerah melampaui target dikarenakan setelah UU No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditetapkan keberadaan BSN sudah mulai diketahui banyak pihak sehingga beberapa pemangku kepentingan datang untuk melakukan koordinasi dengan BSN. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan dari stakholder untuk beraudiensi dengan BSN, disamping Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, serta Rapat Pimpinan di internal BSN, sebagai ajang membahas dan memutuskan hal-hal yang strategis. Sampai akhir tahun 2018, telah tercapai target koordinasi kelembagaan yaitu berjumlah 25 kali koordinasi kelembagaan.

4. Indikator Kinerja : Jumlah press release

Tahun 2018 pencapaian jumlah press release adalah sebanyak 48 terbitan, dari target 48. Beberapa kegiatan penting dan strategis disebarakan ke berbagai kanal media melalui press release ini.

5. Indikator Kinerja : Jumlah laporan tahunan

Jumlah laporan tahunan adalah 1 (satu) dokumen (sesuai dengan target). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk tahun 2018 terdapat perbaikan kualitas baik dari segi konten, desain maupun waktu penyelesaian.

6. Indikator Kinerja : Jumlah kalender tahunan BSN

Untuk kalender BSN, kalender untuk tahun 2018 sesuai dengan target baik dari segi pencapaian target waktu maupun jumlah.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2018 ini Bagian Humas BSN didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 sebesar Rp. 1.371.634.000 dan realisasi anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.325.411.812 atau sebesar 96,6%

III.2 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA: - (tidak ada)

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2018 tanggal 5 Desember 2017, pagu anggaran Biro HOH adalah sebesar Rp. 4.638.780.000 dan realisasi anggaran Biro HOH TA 2018 adalah sebesar Rp 4.500.470.510 .atau sebesar 97 %.

Pagu dan realisasi anggaran Bagian Humas TA 2018 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.xx
Pagu dan Realisasi Anggaran Bagian Humas TA. 2018

Dalam rupiah

Kode	Output/Komponen	2018		%
		Pagu	Realisasi	
3549. 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	1.371.634.000	1.325.411.812	96,6

Laporan Kinerja Bagian Humas Tahun 2018 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bagian Humas Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Biro HOH

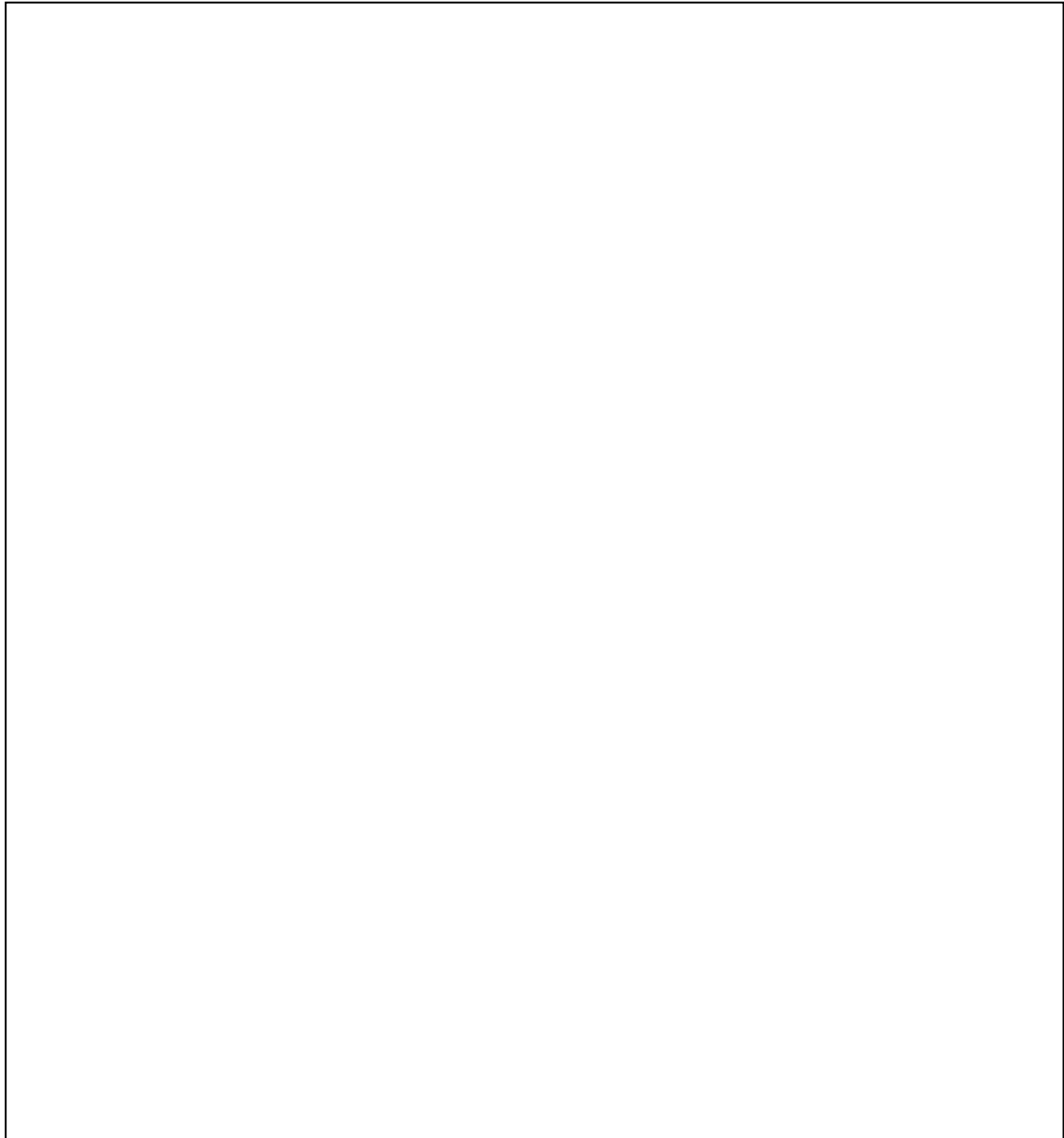
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian Humas Tahun 2018, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Bagian Humas sangat mendukung pelaksanaan kegiatan lingkup Biro HOH.

Sebagai penutup dari laporan akuntabilitas kinerja Bagian Humas Biro HOH, Kesekretariatan Utama - Badan Standardisasi Nasional TA 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja TA. 2018 telah dapat dipenuhi oleh Bagian Humas. Namun demikian, diharapkan tahun berikutnya akan di peroleh hasil yang lebih baik lagi.

Kiranya LAKIP Bagian Humas 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BSN, khususnya Biro Hukum, Organisasi dan Humas di masa mendatang.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BAGIAN HUMAS**



Biro HOH sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, di bidang legislasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kehumasan